

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

DiNapoli, Thomas P., selanjutnya disebut Thomas P. DiNapoli I), 2010, *Local Government Management Guide: Management's Responsibility for Internal Controls*, Division of Local Government and School Accountability, New York.

Efendi, A'an dan Freddy Poernomo, 2017, "*Hukum Administrasi*", Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi, 2011, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah, (The Turning Point of Local Autonomy)*, UB Press, Malang.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2006 "*Penelitian Hukum*", Prenada Media Group, Jakarta.

Oleg Dimov dan Plamen Illiev, 2010, *Controlling-A Modern System Of Manegement and Control*, Series: Economics and Organization, Vol. 7, No. 2.

Poerwadarminta, W.J.S., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indoensia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Parlindungan, A.P, 1991, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Universitas Indonesia (UI-PRESS).

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

S. Nasution, 2003, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cetakan Keenam, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dalam Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Santoso, Urip, 2013, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Santoso, Urip, 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta.

Salim HS, H, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Edisi 1 Cetakan ke-2, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1384.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum adat. Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 12.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

C. Jurnal/ Majalah

Harsono, Boedi (selanjutnya disebut Boedi Harsono-II), “PPAT Sejarah Tugas dan Kewenangannya”, *Majalah RENVOI*, No. 8.44.IV.

Winarsi, Sri, “Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat Umum”, *Majalah YURIDIKA*, Vol 17 No.2.

D. Hasil Penelitian/ Tugas Akhir

Safii, Muhammad, “Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Yogyakarta”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Yuliati, Miming, “Tanggungjawab PPAT Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 07/PDT.G/1997/PN.BJM) Tanggal 28 Maret 1997”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.

Zulkarnain, Ockhy Loedvian, “Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten Bantul”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.

E. Internet

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt504abea55f215/apakan-proses-pengurusan-sertifikat-tanah-prona-dikenakan-biaya-/,](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt504abea55f215/apakan-proses-pengurusan-sertifikat-tanah-prona-dikenakan-biaya-/) diakses tanggal 22 Maret 2020.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap PPAT Sementara di Desa Karya Jaya Bhakti, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

ASRIYATI, Dr. Djoko Sukisno., S.H., C.N.

Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>